Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan Islam

Dedi Susanto¹, Su'aidi², Minnah El Widdah³,

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi¹⁻³,

Email Korespondensi: dedisusanto210297@gmail.com¹, minnahelwiddah@uinjambi.ac.id³

Article received: 3 Januari 2023, Review process: 10 Januari 2023,
Article Accepted: 15 Januari 2023, Article published: 30 Januari 2023

ABSTRACT

The basic concept of Islamic education policy analysis involves a careful analysis process of the formulation, implementation and evaluation of educational policies related to Islamic teachings. This research aims to analyze the basic concepts of Islamic education policy analysis. The method in this research uses a literature study approach. The data collection technique in this research uses documentation, with data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research can be described. First, policy analysis is a method or procedure used to utilize human understanding of policy problems to find solutions. Second, Islamic religious education is an effort that involves guidance and care for students with the aim that they, after completing the educational process, have a good understanding of Islamic teachings and are able to practice them in their daily lives, making them a guide for life. Third, the basic concept of Islamic education policy analysis includes a number of important aspects that are holistic and comprehensive in designing, implementing and evaluating educational policies based on Islamic principles.

Keywords: Concept, Policy Analysis, Islamic Education.

ABSTRAK

Konsep dasar analisis kebijakan pendidikan Islam melibatkan proses analisis yang cermat terhadap perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan yang terkait dengan ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar analisis kebijakan pendidikan Islam. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat dideskripsikan Pertama, analisis kebijakan adalah suatu metode atau prosedur yang digunakan untuk memanfaatkan pemahaman manusia terhadap masalah kebijakan guna mencari solusinya. Kedua, Pendidikan agama Islam merupakan usaha yang melibatkan bimbingan dan pengasuhan terhadap peserta didik dengan tujuan agar mereka, setelah menyelesaikan proses pendidikannya, memiliki pemahaman yang baik terhadap ajaran Islam dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya sebagai pedoman hidup. Ketiga, Konsep dasar analisis kebijakan pendidikan Islam mencakup sejumlah aspek penting yang bersifat holistik dan menyeluruh dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan pendidikan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci: Konsep, Analisis Kebijakan, Pendidikan Islam.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak fundamental yang harus diperoleh oleh setiap penduduk Indonesia, karena melalui pendidikan, kapasitas sumber daya manusia suatu negara dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga seluruh warga Indonesia. Sesuai dengan ungkapan Koe Yao Thung, keberhasilan suatu negara dalam bidang pendidikan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahannya (Esa Putra & Aman, 2020). Oleh karena itu, perencanaan pendidikan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, mengikuti struktur yang terorganisir dan sistematis guna mencapai tujuan pendidikan yang ideal melalui indikator keberhasilan yang dapat diukur. Pada era Orde Baru, perkembangan dan perubahan dalam bidang pendidikan sangat dipengaruhi oleh arus modernisasi, yang menjadi landasan pembangunan.

Pemerintah menunjukkan kekuasaan otoriter dengan kurang memperhatikan aspirasi mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, serta memberikan perhatian yang terbatas terhadap pendidikan Islam dalam konteks pendidikan nasional. Kebijakan pemerintah pada Orde Lama dan Orde Baru cenderung lebih fokus pada modernisasi politik dan menunjukkan sikap diskriminatif terhadap pendidikan Islam. Secara umum, kebijakan awal pada Orde Baru hanyalah kelanjutan dari kebijakan pada Orde Lama, khususnya dalam konteks terhadap pendidikan Islam pada era Orde Baru dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan juga dipengaruhi oleh arus modernisasi dalam konteks pendidikan Islam, serta kecenderungan untuk mengkotomikan pendidikan Islam. Pada masa Orde Baru, pendidikan Islam dianggap sebagai entitas terpisah dari sistem pendidikan nasional, yang menyebabkan keterbatasan ruang gerak dan penggunaannya sebagai alat untuk kepentingan penguasa (Lukis Alam, 2020).

Kebijakan pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk mencapai sasaran pendidikan, baik dalam konteks institusional maupun nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia secara moral dan materi, baik secara fisik maupun spiritual. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang memiliki martabat. Pendidikan ini diarahkan untuk memberdayakan peserta didik agar menjadi individu yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Abdul Azis, 2017).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelusuran dan penelitian dengan metode membaca dan menelaah berbagai jurnal, buku, dan berbagai naskah terbitan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian dalam menghasilkan sebuah tulisan yang berkenaan dengan suatu topik penelitian. Pada penelitian ini tidak terdapat lokasi penelitian, karena seluruh data diambil dari jurnal, buku, dan

proseding ilmiah. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah konsep dasar analisis kebijakan pendidikan islam, dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, dan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dengan melakukan literature review pada buku, artikel jurnal ilmiah dan beberapa kajian ilmiah yang berkaitan dengan konsep dasar analisis kebijakan pendidikan islam, dapat peneliti sajikan sebagai berikut:

1. Konsep Dasar Analisis Kebijakan

Pendidikan Islam dapat dijelaskan sebagai bentuk pendidikan yang berakar pada nilai-nilai ajaran Islam, sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, serta didasarkan pada pemikiran ulama dan pengalaman sejarah umat Islam (Nur Hidayat, 2011). Karenanya, diharapkan pendidikan Islam dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, sambil tetap mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kebijakan pendidikan Islam sendiri merupakan bagian integral dari kebijakan pendidikan secara umum, yang dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan dan langkah-langkah dengan tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan sistem pendidikan memiliki dampak yang signifikan pada warga negara secara luas (Ulandari Safitri, Adek Nuarizal, dan Nurhizrah Gistituati, 2021).

Istilah "kebijakan" merupakan padanan dari kata "policy" dalam bahasa Inggris, yang merujuk pada pengelolaan masalah atau kepentingan umum, atau dapat juga merujuk pada administrasi pemerintahan. Analisis kebijakan adalah kegiatan untuk menghasilkan pemahaman dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pemahaman terhadap proses pembuatan kebijakan, perlu dilakukan penelitian terhadap sebab, akibat, dan kinerja kebijakan serta program publik (William N Dunn, 200).

Dalam mengukur keberhasilan dan vitalitas suatu kebijakan, perlu adanya langkah-langkah tertentu yang melibatkan beberapa tahapan. Pertama, kebijakan harus melalui tahap perumusan masalah dan penyusunan agenda. Kemudian, langkah selanjutnya adalah tahap forecasting atau formulasi kebijakan. Setelah itu, terdapat tahap rekomendasi kebijakan atau adopsi kebijakan, diikuti dengan tahapan monitoring kebijakan atau implementasi kebijakan. Evaluasi kebijakan atau penilaian kebijakan menjadi tahap akhir setelah kebijakan dirumuskan dengan baik.

Pentingnya pelaksanaan kebijakan juga menjadi fokus, di mana keberhasilan implementasi ditentukan oleh variabel seperti kompetensi pelaksana kebijakan, ketersediaan sumber daya, dan kepatuhan terhadap regulasi. Setelah kebijakan dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah evaluasi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana awal. Evaluasi juga diperlukan untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan yang mungkin timbul, serta untuk menilai hasil atau dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk perumusan kebijakan baru yang lebih baik.

Menurut Thomas Dye sebagaimana dikutip oleh Subarsono, kebijakan dapat diartikan sebagai segala pilihan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah. Meskipun konsep ini bersifat luas dan berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam suatu negara, jika diterapkan pada konteks lembaga pendidikan, kebijakan dapat diinterpretasikan sebagai segala pilihan yang diambil atau tidak diambil oleh pengurus lembaga pendidikan. Dalam konteks ini, definisi tersebut mencerminkan bahwa pertama-tama, kebijakan dibuat dan dirumuskan oleh pengurus lembaga pendidikan. Kedua, kebijakan melibatkan berbagai pilihan yang harus dipertimbangkan atau tidak dilakukan (Subarsono, 2008). Menurut Tilaar dan Nugroho (2008), kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil dari penyusunan langkah-langkah strategis dalam bidang pendidikan, yang diuraikan berdasarkan visi dan misi pendidikan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat dalam jangka waktu tertentu (Tilaar. H.A.R & Riant Nugroho, 2008).

Perumusan kebijakan hingga mencapai keputusan kebijakan melibatkan serangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan dan analisis informasi terkait dengan masalah yang dihadapi. Proses ini selanjutnya berusaha mengembangkan berbagai alternatif kebijakan, membangun dukungan, dan melakukan negosiasi untuk akhirnya memilih kebijakan yang tepat. Penting untuk dicatat bahwa keputusan kebijakan bukan sekadar pemilihan dari berbagai alternatif, melainkan merupakan tindakan konkret terkait dengan pilihan yang diterima. Alternatif-alternatif kebijakan yang dapat dipilih sering kali disetujui oleh para pendukung tindakan tersebut. Saat proses kebijakan menuju tahap pembuatan keputusan, beberapa usulan akan diterima, sebagian ditolak, dan mungkin ada penyempitan pada beberapa usulan. Pada tahap ini, perbedaan pendapat akan menyempit, dan tawar-menawar akan terjadi hingga akhirnya kebijakan menjadi formalitas dalam beberapa hal (Winarno & Budi, 2008).

Berikut adalah upaya-upaya yang diarahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 untuk mencapai tujuan-tujuan berikut: (1) Memperluas dan menyamakan peluang akses terhadap pendidikan bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tujuan menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas tinggi melalui peningkatan anggaran pendidikan secara signifikan. (2) Meningkatkan kualifikasi akademis dan profesional serta menjamin kesejahteraan tenaga kependidikan agar dapat berfungsi secara optimal, terutama dalam meningkatkan aspek pendidikan karakter dan moral untuk mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan. (3) Melakukan reformasi pada sistem pendidikan, termasuk diversifikasi kurikulum untuk melayani beragam peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku secara nasional dan lokal sesuai dengan kebutuhan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional. (4) Memberdayakan lembaga pendidikan, baik sekolah maupun luar sekolah, sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, sambil meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. (5) Melakukan pembaruan dan penguatan Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen. (6) Meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh

masyarakat dan pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. (7) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sejak dini secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui upaya proaktif dan reaktif oleh semua komponen bangsa, agar generasi muda dapat berkembang secara optimal dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya. (8) Meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi nasional, dalam dunia usaha, terutama pada usaha kecil, menengah, dan koperasi, guna meningkatkan daya saing produk berbasis budaya lokal (Choirul mahfud, 2016).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan adalah suatu metode atau prosedur yang digunakan untuk memanfaatkan pemahaman manusia terhadap masalah kebijakan guna mencari solusinya. Pada dasarnya, analisis kebijakan melibatkan penerapan pengetahuan terhadap suatu hal dalam konteks proses kebijakan. Secara historis, tujuan dari analisis kebijakan adalah menyediakan informasi kepada pembuat kebijakan sebagai dasar pertimbangan rasional untuk menemukan solusi terhadap masalah kebijakan (Fatkuroji, 2012).

2. Pendidikan Islam

Pendidikan merupakan suatu proses di mana manusia (peserta didik) mengalami pertumbuhan dan kematangan untuk dapat berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya. Proses interaksi ini melibatkan serangkaian latihan dan pengalaman yang dialami oleh peserta didik. Dalam konteks lain, pendidikan tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kebijakan nasional atau penyesuaian nilai-nilai masyarakat. Lebih dari itu, pendidikan perlu dipandang sebagai salah satu kekuatan sosial yang turut berperan dalam membentuk, memberikan karakter, dan menentukan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang (Muhibbin Syah, 2003).

Perkembangan pendidikan selalu mengalami perubahan seiring dengan kemajuan zaman. Manusia sebagai sumber daya harus terus beradaptasi dengan perkembangan yang terus bergerak maju. Kelahiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) secara signifikan memengaruhi pendidikan agama di Indonesia. UU ini mencakup aspek-aspek terkait dengan pendidikan agama, termasuk dalam tujuan pendidikan nasional dan jenis pendidikan di berbagai lembaga pendidikan. Dengan berlakunya UUSPN Nomor 2 Tahun 1989 dan peraturan pemerintah yang terkait, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan pembelajaran pendidikan agama Islam menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan Agama Islam di lembaga pendidikan Islam menjadi bagian subsistem dari sistem pendidikan nasional. Undang-Undang ini juga mencakup ketentuan yang menjamin hak setiap peserta didik untuk menerima pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik tersebut (Windy Dian Sari, Akhmad Shunhaji, 2020).

Menurut Ibn Khaldun di dalam buku Mukadimmah yang merupakan karya magnum opusnya, mempunyai pengertian yang cukup luas. Dimana menurut pendapatnya, pendidikan bukan hanya merupakan proses belajar

mengajar yang dibatasi oleh empat dinding, tetapi pendidikan adalah suatu proses, dimana manusia secara sadar menangkap, menyerap, dan menghayati peristiwa-peristiwa alam sepanjang zaman. Pengertian Pendidikan Islam menurut Ahmad Tafsir berpendapat bahwa, pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam, terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-quran dan Al-sunnah/hadits.

Menurut Ki Hajar Dewantara, Pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam diri siswa. Fokus dari proses ini adalah mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia ini. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa setiap anak memiliki sifat lahir dan batin yang unik, sehingga peran pendidikan sangat penting untuk membimbing mereka agar memiliki kekuatan untuk tumbuh dan berkembang serta meningkatkan perilaku mereka ke arah yang lebih positif (Sholichah, A. S, 2018).

Menurut Zakiah Daradjat, Pendidikan agama Islam merupakan usaha yang melibatkan bimbingan dan pengasuhan terhadap peserta didik dengan tujuan agar mereka, setelah menyelesaikan proses pendidikannya, memiliki pemahaman yang baik terhadap ajaran Islam dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya sebagai pedoman hidup (Sritama, W, 2019).

Dari segi terminologi, Islam merujuk pada agama yang berasaskan pada lima pilar utama, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, membayarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menjalankan ibadah haji bagi yang sudah mampu (Abuddin Nata, 2011). Dari sudut pandang lain, Harun Nasution menguraikan bahwa Islam merupakan agama yang mengandung ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Tuhan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad saw. sebagai rasul (Harun Nasution, 1979). Islam memiliki makna "penyerahan" atau pengabdian sepenuhnya kepada Tuhan (Allāh). Pengikut dari ajaran Islam disebut sebagai Muslim, yang bermakna "individu yang tunduk kepada Tuhan," dengan penamaan lebih spesifik untuk laki-laki yaitu Muslimin dan untuk perempuan yaitu Muslimat.

Dari berbagai sudut pandang yang disajikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang keseluruhan ajarannya bersumber dari Alquran dan Al-Hadis. Agama ini mengatur dan membimbing kehidupan manusia dalam kaitannya dengan Allah, hubungan antar sesama manusia, dan interaksi dengan alam semesta. Seiring dengan perubahan waktu, prioritas-prioritas yang berbeda telah sedikit menggeser fokus pembaharuan di bidang pendidikan, mengakibatkan minimnya sentuhan pada produk hukum pendidikan pada awal masa reformasi. Situasi ini dapat diamati setidaknya selama kepemimpinan Presiden B.J. Habibie hingga awal masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Barulah pada pertengahan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarno Putri, perhatian terhadap bidang pendidikan mulai meningkat. Hal ini tercermin, antara lain, dalam produk kebijakan seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, serta Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Supriadin, 2014).

Dari segi yuridis, pengelolaan pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan signifikan. Evolusi ini dapat ditelusuri melalui kebijakan-kebijakan yang diterbitkan sejak awal kemerdekaan hingga masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi, terutama yang terkait dengan tata kelola pendidikan nasional. Pada era orde lama, kebijakan pengelolaan pendidikan nasional diatur dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950 bersama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1954. Pada masa orde baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengubah dan menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya, terwujud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, pada masa orde reformasi, Undang-Undang yang diterbitkan pada era orde baru diperbaharui oleh pemerintah melalui penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Supriadin, 2014).

Dalam perspektif pendidikan Islam, Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, juga mengatur jalannya proses pendidikan Islam melalui Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Pada dasarnya, UU tersebut berisi ketentuan-ketentuan terkait pendidikan Islam, yang mencakup penerimaan kelembagaan pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren, pengakuan pendidikan Islam sebagai mata pelajaran di sekolah atau madrasah, serta pengakuan Islam sebagai kumpulan nilai-nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional Haidar Purta Daulay, 2007).

3. Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan Islam

Sejarah manusia melibatkan analisis kebijakan karena ini merupakan suatu prosedur berpikir yang telah lama dikenal dalam memecahkan masalah publik. Pendekatan ini melibatkan pemecahan masalah publik melalui argumentasi rasional, yang perlu dilakukan dalam kerangka disiplin ilmu sosial terapan. Dengan menggunakan argumentasi rasional ini, dapat disediakan fakta-fakta yang mendukung penjelasan dan penilaian dalam menyelesaikan masalah publik. Dari sisi lain, kebijakan dapat diartikan sebagai langkah atau prosedur dalam menangani suatu masalah dengan memanfaatkan pemahaman manusia itu sendiri.

Proses analisis kebijakan di sini merujuk pada sebuah metode yang memiliki kemampuan untuk mendisiplinkan ilmu sosial. Selain itu, proses analisis kebijakan juga melibatkan pengumpulan argumentasi ganda dan pemanfaatan informasi yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam sebuah kebijakan. Istilah "kebijakan" mengacu pada suatu tindakan atau langkah yang bertujuan menangani permasalahan dalam suatu lingkungan. Dengan demikian, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh orang lain atau permasalahan umum yang mungkin memberikan manfaat bagi kehidupan orang banyak. *Educational policy*, atau yang dapat disebut sebagai kebijakan pendidikan, memiliki arti yang setara dengan kebijakan pemerintah dalam suatu bidang, khususnya di bidang

pendidikan. Mutu pendidikan sendiri merupakan hasil dari produk individu atau kelompok terpilih, sehingga mereka dapat dianggap sebagai pembuat kebijakan pendidikan.

Pendidikan yang berkembang atau mencapai standar cita-cita tertentu merupakan hasil dari implementasi kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan tersebut mencakup serangkaian peraturan yang dimiliki atau dikeluarkan oleh pemerintah. Tata aturan, aspek politik, pemberdayaan, alokasi anggaran, dan elemen lainnya semuanya merupakan produk dari sikap pemerintah terkait dengan kebijakan pendidikan (Sari W, Rifki AM, Karmila M, 2020).

Proses kebijakan melibatkan input dan output, yang memiliki beberapa makna. Input proses kebijakan dapat diartikan sebagai rencana atau agenda pemerintah terkait dengan pelaksanaan kebijakan, sementara output proses kebijakan merujuk pada kinerja pemerintah terkait dengan pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Dalam konteks kinerja, evaluasi menjadi unsur penting yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja suatu kebijakan. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja kebijakan dapat mencapai target yang diinginkan atau diharapkan (Bakry A, 2010).

Konsep dasar analisis kebijakan pendidikan Islam mencakup sejumlah aspek penting yang bersifat holistik dan menyeluruh dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan pendidikan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Beberapa poin utama dalam konsep dasar analisis kebijakan pendidikan Islam melibatkan: (1) Pemahaman Mendalam terhadap Nilai-nilai Islam (Memahami prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai landasan moral dan etika dalam merancang kebijakan pendidikan, Menyelaraskan kebijakan dengan nilai-nilai agama Islam yang mencakup keadilan, kebenaran, dan keutamaan moral) (2) Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan (Melibatkan masyarakat, guru, orang tua, dan pelajar sebagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan pendidikan Islam, Memastikan partisipasi aktif untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan) (3) Inklusivitas dalam Struktur Kebijakan (Menyusun kebijakan pendidikan yang inklusif, mengakomodasi kebutuhan dan keberagaman peserta didik. Mempertimbangkan pemberdayaan perempuan, kelompok minoritas, dan individu dengan kebutuhan khusus dalam konteks pendidikan Islam) (4) Peningkatan Kualitas Proses Pendidikan (Meningkatkan metode pengajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mempromosikan pemahaman mendalam terhadap materi agama. Fokus pada peningkatan kompetensi akademis dan moral peserta didik) (5) Pemberdayaan Masyarakat (Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Menyediakan dukungan infrastruktur dan sumber daya untuk meningkatkan kemandirian lembaga pendidikan) (6) Evaluasi Terus-menerus (Melakukan evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan pendidikan Islam untuk menilai pencapaian tujuan dan mengidentifikasi area perbaikan. Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar untuk perubahan dan pengembangan kebijakan lebih lanjut). Dengan menggabungkan aspek-aspek tersebut, konsep dasar analisis kebijakan pendidikan Islam diarahkan untuk menciptakan sistem pendidikan yang

berkesinambungan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan berdaya saing tinggi.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan konsep dasar analisis kebijakan pendidikan islam dapat dideskripsikan *Pertama*, analisis kebijakan adalah suatu metode atau prosedur yang digunakan untuk memanfaatkan pemahaman manusia terhadap masalah kebijakan guna mencari solusinya. *Kedua*, Pendidikan agama Islam merupakan usaha yang melibatkan bimbingan dan pengasuhan terhadap peserta didik dengan tujuan agar mereka, setelah menyelesaikan proses pendidikannya, memiliki pemahaman yang baik terhadap ajaran Islam dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya sebagai pedoman hidup. *Ketiga*, Konsep dasar analisis kebijakan pendidikan Islam mencakup sejumlah aspek penting yang bersifat holistik dan menyeluruh dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan pendidikan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Evita Roesnilam Syafitri dan Wiryo Nuryono, Studi Kepustakaan Teori Konseling 'Dialectical Behavior Therapy, Jurnal BK, Vol.11, No. 1 (2020), hal. 56.
- Indriya, I., Amara, H., Nusaibah, H., & Nurmala, I. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Indonesia Dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(4), 433-450.
- Maghfuri, A. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Era Reformasi (1998-2004). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 14-26.
- Masnua, Syafira, Nyayu Khodijah, and Ermis Suryana. "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas)." *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI 9.1* (2022): 115-130.
- Setiawan, F., Ramadhan, A. S., Julianti, T., & Widodo, S. (2021). IMPLEMENTASI KONSEP DASAR KEBIJAKAN PENIDDIKAN ISLAM DI INDONESIA. *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 87-98.
- Sylva Alkkornia, "Studi Deskriptif Kompetensi Pedagogik Dan Profesionalisme Guru Paud Dharma.
- Warlizasusi, J., Sumarto, S., Sundari, A. N., Mawaddah, A., Susyanto, B., Budiman, B., ... & Ningsih, W. S. (2022). Analisis kebijakan pendidikan islam.
- Yuniarti, I., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 9(1), 182-207.